

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



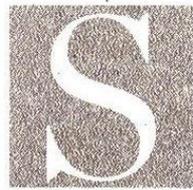
SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Bantu Pendidikan Mahasiswa



ebagian mahasiswa penerima program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terancam putus kuliah karena dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pendidikan itu.

Kondisi ini terjadi seiring penurunan alokasi anggaran program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Selama ini bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga miskin itu menjadi salah satu cara memutus rantai kemiskinan di DKI.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi 31,45 persen. Di Provinsi DKI Jakarta, APK perguruan tinggi terus naik dari semula 33,5 persen pada 2016 menjadi 40,05 persen pada 2021. Artinya 40 dari 100 warga di usia 18-25 tahun sedang kuliah.

Membaiknya APK perguruan tinggi di DKI Jakarta tak lepas dari adanya bantuan pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program KJMU sejak 2016, yakni bantuan pendidikan bagi mahasiswa berupa dana Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester.

Sasarannya adalah pelajar DKI Jakarta dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada 2023 tercatat 23.958 penerima. Namun, tahun ini Pemprov DKI Jakarta hanya mengalokasikan KJMU Rp 180 miliar atau setengah dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 360 miliar (*Kompas*, 7/3/2024).

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan tak mencabut penerima KJMU yang sudah berjalan. Kebijakan yang ditetapkan adalah pemadanan data kesejahteraan sosial agar penerima manfaat tepat sasaran. Akan tetapi, validasi data itu menimbulkan keluhan karena sebagian mahasiswa dikeluarkan dari daftar penerima program.

Saat ini bantuan pendidikan di Indonesia oleh pemerintah menjadi harapan bagi para pelajar dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses layanan pendidikan tinggi. Mengingat, meningkatnya biaya pendidikan tinggi makin memberatkan warga, bahkan tak terjangkau keluarga miskin.

Tak hanya keluarga miskin, sebagian masyarakat dari kelas menengah pun terkendala dalam membayar uang kuliah. Namun, mereka kesulitan mengakses berbagai skema beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemerintah karena dinilai tidak memenuhi syarat.

Hal ini menyebabkan generasi muda Indonesia kini di-bayang-bayangi ancaman tidak dapat melanjutkan kuliah. Ketidaksanggupan memenuhi kewajiban membayar uang kuliah menjadi kendala utama banyak anak muda. Bahkan, sebagian mahasiswa terjerat pinjaman daring untuk membayar uang kuliah.

Pembiayaan pendidikan tinggi yang mahal menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat di Indonesia, terutama warga kurang mampu. Untuk itu, berbagai skema beasiswa dan bantuan pendidikan mesti dikelola pemerintah secara transparan sebagai wujud kehadiran negara dalam layanan pendidikan di Tanah Air.

Penyediaan layanan pendidikan yang bermutu secara merata mesti dipandang sebagai bentuk investasi sumber daya manusia unggul guna mewujudkan Indonesia emas. Pendidikan tinggi juga menjadi sarana bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan memperoleh keadilan.